

Nomor : B/ 419 /RB.06/2022

7 Maret 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Yth. Wali Kota Balikpapan

di

Balikpapan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2021 adalah **68,00** dengan kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,54	12,62
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,22	5,96
	III. Reform	30,00	15,13	17,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,00	35,68
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,81	7,83
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58	9,25
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,03	7,72
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,02	7,52
	Total Komponen Hasil	40,00	32,44	32,32
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,33	68,00

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kota Balikpapan, sebanyak 9 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	256	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	ASN Profesional	0-100	53,01	Badan Kepegawaian Negara
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,44	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	46,58	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,51	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Kepatuhan Pelayanan Publik	0-100	99,25	Ombudsman Republik Indonesia
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	22,95	Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

- a. Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah sudah berjalan baik namun, penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah (PD) belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berdasarkan permasalahan khususnya pada level PD, sehingga hasil dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada di organisasi;
- c. Pemerintah Kota Balikpapan sudah menetapkan agen perubahan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun pada PD. Namun, agen perubahan yang

sudah ada belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan;

- d. Peta keterkaitan antar kebijakan, terutama antara kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah disusun. Namun pemanfaatannya belum maksimal dalam melakukan evaluasi keterkaitan kebijakan dan melihat efektivitas serta dampak dari kebijakan yang sudah diimplementasikan;
 - e. Pemerintah Kota Balikpapan telah menindaklanjuti salah satu *quick wins* nasional pelaksanaan reformasi birokrasi dengan telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
 - f. Belum dilakukan penyusunan peta proses bisnis baru setelah proses penyederhanaan birokrasi, peta proses bisnis yang sebelumnya belum bisa sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja utama organisasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - g. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, seperti tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan pemanfaatan Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya yang belum dimanfaatkan sebagai indikator capaian pegawai dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
 - h. Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun unit-unit kerja Zona Integritas dan telah diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional namun, kualitas implementasi zona integritas dari beberapa unit kerja yang diusulkan belum maksimal sehingga belum mampu mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - i. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada PD;
 - j. Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya dalam mempermudah pelayanan dengan telah membentuk Mal Pelayanan Publik, telah terintegrasi dengan SPAN-LAPOR, dan menciptakan berbagai macam inovasi. Namun implementasi pelayanan publik di Kota Balikpapan masih belum optimal, terutama terkait evaluasi atas dampak dari inovasi yang telah diciptakan.
4. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	68,99	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	92,50	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	77,22	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	79,07	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten memastikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai dapat mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
2. Melakukan penguatan dan penajaman rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan memastikan bahwa rencana aksi RB disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu perlu memastikan keselarasan antara rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik;
3. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan dalam menciptakan budaya kinerja dengan membuat dan mengimplementasikan rencana kerja Agen Perubahan yang terukur, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap rencana kerja perubahan yang dilakukan;
4. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area

pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan kepada seluruh pegawai;

5. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan memanfaatkan peta keterkaitan antara kebijakan pusat/pemerintah daerah dengan kebijakan dari perangkat daerah sebagai alat untuk mengidentifikasi kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan di atasnya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi terkait efektivitas serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan;
6. Menyusun peta proses bisnis yang telah sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan kinerja yang akan dihasilkan;
7. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi baik dilingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat sehingga seluruh pegawai dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan;
8. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM secara menyeluruh. Mulai dari menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi, pemanfaatan ukuran indikator kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai, dan menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP). Hasil dari hal-hal tersebut agar dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian *reward and punishment*, dan perbaikan manajemen SDM di Pemerintah Kota Balikpapan;
9. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting* melalui upaya peningkatan kapabilitas APIP;
10. Menguatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses pembangunan Zona Integritas sebagai pendamping, fasilitator, dan evaluator bagi unit unit kerja, sehingga akan meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas. Memperkuat pemahaman TPI dan unit-unit kerja zona integritas yang telah dibangun dengan mendorong implementasi penerapan zona integritas melalui pelaksanaan dan evaluasi berkala atas seluruh rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya;
11. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Balikpapan;
12. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan melakukan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan dan terus menciptakan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Timur.